**RENCANA KERJA**

**KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2023**



**KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wungu merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Wungu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Wungu. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Wungu disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Wungu. Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wungu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Wungu tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

|  |
| --- |
| CAMAT WUNGU  **Drs. EKO SUWARTONO**  Pembia  NIP. 19660901 198701 1 001 |

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc77103692)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc77103693)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc77103694)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc77103695)

[1.2 Landasan Hukum 3](#_Toc77103696)

[1.3 Maksud dan Tujuan 7](#_Toc77103697)

[1.4 Sistematika Penulisan 8](#_Toc77103698)

[BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10](#_Toc77103699)

[2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 10](#_Toc77103700)

[2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 19](#_Toc77103701)

[2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23](#_Toc77103702)

[2.3.1 Pelayanan Kecamatan Wungu 24](#_Toc77103703)

[2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Wungu 36](#_Toc77103704)

[2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional 36](#_Toc77103705)

[2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan 37](#_Toc77103706)

[2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 20XX 38](#_Toc77103707)

[2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 39](#_Toc77103708)

[2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44](#_Toc77103709)

[BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46](#_Toc77103710)

[3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 46](#_Toc77103711)

[3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 48](#_Toc77103712)

[3.3 Program dan Kegiatan 49](#_Toc77103713)

[BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60](#_Toc77103714)

[BAB V PENUTUP 75](#_Toc77103715)

**DAFTAR TABEL**

[Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Wungu 12](#_Toc77103458)

[Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d ….. (tahun berjalan) Kabupaten Madiun 14](#_Toc77103459)

[Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Kecamatan Wungu 19](#_Toc77103460)

[Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ……… Provinsi/Kabupaten/Kota …………. 40](#_Toc77103461)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Wungu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Wungu memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Kecamatan Wungu 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Wungu ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Wungu sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Wungu yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Wungu tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Wungu tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wungu; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Wungu; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Wungu; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Wungu.

Renja Kecamatan Wungu Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Wungu untuk tahun Ke Lima periode Renstra Kecamatan Wungu 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Wungu Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Wungu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023, Renstra Kecamatan Wungu, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Wungu.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RenjaKecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus* *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kabupaten Madiun.
33. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Wungu adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Wungu dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Wungu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Wungu adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Wungu.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2023 meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
  3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
  4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
  3. Program dan Kegiatan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wungu tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Wungu Dari hasil evaluasi yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa program dan kegiaan Kecamatan Wungu diatas tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah personil yg melaksanakan tugas pelayanan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan public.

3. Jaringan internet yg sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Wungu tidak di temukan.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Wungu Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2. 1   
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Wungu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target** | **Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target** | **Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebih Target** | **Solusi yang dilakukan** |
| **1.** | Semua Program/kegiatan sudah sesui target. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. ( Kasi Pelayanan ) | Semua Program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. | Lebih di efektifkan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. |
| **2.** |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. ( Kasi PMP ) |  |  |
| **3.** |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional. ( kasi Kesos ) |  |  |
| **4.** |  | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. ( Kasi Trantib ) |  |  |
| **5.** |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. ( Kasi Trantib ) |  |  |
| **6.** |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ( Kasi Tapem ) |  |  |
| **7.** |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. ( Kasi Tapem ) |  |  |

*Sumber:*

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RenjaKecamatan Wungu tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Wungu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C . 29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wungu dan   
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN WUNGU. | | | |  |  |  |  |  | lembar:… | | |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes*)/*Kegiatan *(output*)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)**  **2021** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)**  **2023** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan** | | |
| **Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)**  **2022** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)**  **2022** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)**  **2022** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
| 7.01.01 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | 85 | 80,30 | 84 | 75,03 | 89,32 % | 85 | 240,33 | 2.84 % |
|  |  | **Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan** | 80 | 82 | 79 | 86,36 | 109,31 % | 80 | 248,36 | 3,10 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **86,28** | 87 % | 100 persen | 287 | 2,87 % |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 % | 1. kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasi dengan baik | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 % | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **92,99** | 93 % | 100 persen | 293 | 2,93% |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **92,99** | 93 % | 100 persen | 293 | 2,93% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase kegiatan di kelurahan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **92,99** | 93 % | 100 persen | 293 | 2,93% |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **85,79** | 86 % | 100 persen | 286 | 2,86% |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **85,79** | 86 % | 100 persen | 286 | 2,86% |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah fasilitasi penegakan perda dan pengawasan dan perijinan | 0 | 0 | 100 persen | **85,79** | 86 % | 100 persen | 286 | 2,86% |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **85,79** | 86 % | 100 persen | 286 | 2,86% |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | 100 persen | 100 persen | 100 persen | **85,79** | 86 % | 100 persen | 286 | 2,86% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8=(7/6)** | | **9** | | **10=(5+7+9)** | | **11=(10/4)** | |
| 7.01.06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 100 persen | | 100 persen | | 100 persen | | **86,44** | | 86 % | | 100 persen | | 286 | | 2,86% | |
| 7.01.06.2.01 | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | | 100 persen | | 100 persen | | 100 persen | | **86,44** | | 86 % | | 100 persen | | 286 | | 2,86% | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2   
Sasaran Strategi   
Kecamatan Wungu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79 | 86,36 | 109 % |
|  | Nilai SAKIP Kecamatan | 84 | 75,03 | 89,32 % |

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai sasaran strategi Kecamatan Wungu, Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan yang digunakan sebagai alat pengukur tingkat kinerja pelayanan yang meliputi kejelasan persyaratan pelayanan masyarakat, kesederhanaan prosedur pelayanan masyarakat, kepastian biaya pelayanan, serta ketepatan waktu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan Kecamatan Wungu sudah baik dan perlu dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wungu sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Administrasi Pemerintahan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C. 30   
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wungu   
Kabupaten Madiun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target NSPK** | **Target IKK** | **Target indikator** | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | | | | | **Realisasi capaian Tahun ke-** | | | | | **Rasio capaian pada Tahun ke- (%)** | | | | |
|  |  | **lainnya** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |  |  |  | A | A | 81 | 81 | 82 | C | CC | B  69,87 | BB  76,72 | A  80,30 |  |  | 87,32 | 95,88 | 100 |
| 2 | Indeks Kepuasan layanan Masyarakat Kecamatan |  |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 80 | 85 | 86 | 91 | 91,60 | 80 | 82 | 85 | 91 | 91,60 |
| 3 | Persentase layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase layanan bidang Administrasi Kecamatan |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan Tabel T.C-30 diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kec. Wungu selama lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan pada layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan layanan bidang Administrasi Kecamatan . Akan tetapi, perlu adanya peningkatan aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi internal, serta aspek capaian kinerja dalam meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun-tahun kedepan agar kepuasan layanan masyarakat kecamatan dapat lebih optimal.

## Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Wungu menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Memasuki era globalisasi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) amanat yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian kualitas layanan publik untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai perwujudan Good Governance dalam bentuk akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat. Selaku penyelenggara Pelayanan publik, dimana seharusnya bisa memberikan pelayanan secara akurat, cepat, tepat dan akuntabel, namun pada kenyataannya masih belum bisa memberikan pelayanan seperti yang diharapkan tersebut di atas, hal ini disebabkan kualitas/ profesionalisme aparatur pemerintahan baik kecamatan maupun desa masih rendah / kurang produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur.
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha yang masih sangat minim dalam penyelenggaraan pembangunan utamanya pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.3.1 Pelayanan Kecamatan Wungu

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

### Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

* + 1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yangmeliputi:
       1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaanmasyarakat.
       2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum
       3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
       4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum.
       5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan.
       6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
       7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/ataukelurahan.
    2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatasCamat melaksanakan kewenanganpemerintahanyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputiaspek:
       1. Perizinan.
       2. Rekomendasi.
       3. Koordinasi.
       4. Pembinaan.
       5. Pengawasan.
       6. Fasilitasi.
       7. Penetapan.
       8. Penyelenggaraandan
       9. Kewenangan lain yangdilimpahkan
    3. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimaan tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada PeraturanPemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaanmasyarakat.
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum.
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana faislitasumum.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/ataukelurahan.
9. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pascabencana.
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan diKecamatan.
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjaKecamatan.
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangtugasnya.

### Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan.

### SekretarisKecamatan

* + 1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan diKecamatan
    2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

DalammelaksanakantugasnyaSekretarisKecamatanmenyelenggarakanfungsi:

1. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatansekretariat.
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturKecamatan.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
6. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
7. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa/ Lurah.
8. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
    * 1. Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum danKepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
       1. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
11. Sub BagianUmum dan Kepegawaian, mempunyaitugas:
    1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaran pelayanan di Kecamatan
    2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
    3. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
    4. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
    5. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
    6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
    7. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
    8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
    1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
    2. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
    3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
    4. Mengelola keuangan Kecamatan.
    5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
    6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi :**

### SeksiTata Pemerintahan Desa/ Kelurahan

* + 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidangpemerintahan.
    2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

Dalam melaksanakantugasnya, Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan menyelenggarakanfungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan bidangpemerintahan.
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahanumum.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan
4. Pelaksanaan fasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa/ kelurahan
5. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau penjabatsementara.
6. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
7. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
8. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
9. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
10. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
11. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antardesa.
12. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai degan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayahkerjanya.
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum

* + 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum.
    2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum Dan perlindunganmasyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindunganmasyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindunganmasyarakat.
4. Pelaksanaan tugan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lannya diwilayahkerjanya.
5. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindunganmasyarakat
6. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertibanumum.
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
8. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
9. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makluk hdup dan kelestarianlngkungan.
10. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayahkerjanya.
11. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

### Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

* + 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidangekonomi
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

* 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  2. Menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  4. Melaksanakan fasilitas dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
  5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
  6. Melaksanaan kordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
  7. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan;dan
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**Seksi Kesejahteraan Sosial**

* + 1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidangkemasyarakatan.
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

* 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
  2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
  3. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan ;
  4. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
  5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati;dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Pelayanan**

* + 1. Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidangkemasyarakatan.
    2. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaCamat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

* 1. Melaksanakan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
  2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
  3. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
  4. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
  5. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
  6. Melaksanakanpengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
  7. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan;dan
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan Pelayanan Publik.

### Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Wungu

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

### Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”***Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| MISI I | Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun. |
| MISI 2 | Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. |
| MISI 3 | Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. |
| MISI 4 | Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. |
| MISI 5 | Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal. |

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai garda depan Urusan Administrasi Pemerintahan, menyelenggarakan urusan Pemerintahan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-II Kabupaten Madiun yaitu: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

### Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Kompetensi SDM masih perluditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yangtersedia
3. Lemahnya managemen informasi datakecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PemerintahKabupaten
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

### Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wungu dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi serta program Bupati dan Wakil Bupati.

2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing.

4. Membuat SOP sebagai juknis dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas/ kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.

7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Kecamatan Wungu dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Wungu terdiri dari 5 program dan 5 kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Wungu terdiri dari 5 program dan 5 kegiatan. Serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C . 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023   
KABUPATEN MADIUN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN WUNGU | | | | | |  |  |  | |  | lembar…… | dari….. |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp. 000)** | | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana**  **(Rp. 000)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kec. Wungu | **Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan** | 100 % | 6.207.024 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kec. Wungu | **Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan** | 100 % | 6.207.024 | Sesuai |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Kec. Wungu | Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas | 1 kegiatan | 6.000.000 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Kec. Wungu | Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas | 1 kegiatan | 6.000.000 | Sesuai |
|  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Wungu | Jumlah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasi dengan baik | 1 Kegiatan | 5.803.388 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Wungu | Jumlah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang terkoordinasi dengan baik | 1 Kegiatan | 5.803.388 | Sesuai |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Wungu | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 1 Kegiatan | **946.188.116** | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Wungu | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 1 Kegiatan | **946.188.116** | Sesuai |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Wungu | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 113.368.846 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Wungu | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 113.368.846 | Sesuai |
|  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kec. Wungu | Persentase kegiatan di kelurahan | 100 % | 423.773.166 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kec. Wungu | Persentase kegiatan di kelurahan | 100 % | 423.773.166 | Sesuai |
|  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Wungu | Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 % | **23.132.813** | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Wungu | Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 % | **23.132.813** | Sesuai |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Wungu | Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | 100 % | 16.000.000 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Wungu | Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | 100 % | 16.000.000 | Sesuai |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kec. Wungu | Jumlah fasilitasi penegakan perda dan pengawasan dan perijinan | 0 % | 7.132.813 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kec. Wungu | Jumlah fasilitasi penegakan perda dan pengawasan dan perijinan | 0 % | 7.132.813 | Sesuai |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Wungu | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | **38.638.941** | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Wungu | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | **38.638.941** | Sesuai |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Wungu | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | 100 % | 38.638.941 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Wungu | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | 100 % | 38.638.941 | Sesuai |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Wungu | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | **133.577.776** | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Wungu | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | **133.577.776** | Sesuai |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Wungu | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | 100 % | 76.844.026 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Wungu | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana | 100 % | 76.844.026 | Sesuai |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Wungu | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah  2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah | 83,00 nilai  88 nilai | 18.779.922    **5.265.294.773** | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Wungu | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah  2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah | 83,00 nilai  88 nilai | 18.779.922    **5.265.294.773** | Sesuai |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan | 16 Dokumen | 18.779.922 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan | 16 Dokumen | 18.779.922 | Sesuai |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 Persen | **4.272.669.783** | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 Persen | **4.272.669.783** | Sesuai |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 Persen | 0 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan | 100 Persen | 0 | Sesuai |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase layanan umum yang tersedia | 100 Persen | 166.247.562 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Wungu | Persentase layanan umum yang tersedia | 100 Persen | 166.247.562 | Sesuai |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Wungu | persentase barang milih daerah yang terpelihara dengan baik | 100 Persen | 0 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Wungu | persentase barang milih daerah yang terpelihara dengan baik | 100 Persen | 0 | Sesuai |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Wungu | Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi | 100 Persen | 408.484.693 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Wungu | Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi | 100 Persen | 408.484.693 | Sesuai |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Wungu | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100 Persen | 399.112.813 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Wungu | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100 Persen | 399.112.813 | Sesuai |

## Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2. 5   
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wungu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | **12 Desa**  **2 Kelurahan** | **Pembangunan Infra Struktur** | **91 Usulan dari Desa / Kelurahan se Kecamatan Wungu** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”.** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”.** Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mentaldan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanandan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas.Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1   
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Prioritas Nasional** | **Provinsi Jawa Timur** | **Kabupaten Madiun** |
| 1 | Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan ber keadilan. | Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata. | Pemulihan ekonomi daerah yang terkait denagn percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan , produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan , perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan. |
| 2 | Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. | Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemeataan hasil pembangunan serta penaingkatan layanan infrastruktur. | Bantuan Langsung Tunai desa dan kegiatan penanganan pandemic Covid-19 yang merupakan kewenangan desa. |
| 3 | SDM berkualitas dan berdaya saing. | Peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. | Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata. |

1. **Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wungu Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Administrasi Pemerintahan masuk pada misi ke-II yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berdasarkan Misi ke.II Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 25  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wungu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Formula Hitung** | **Target pada tahun 2023** |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas. |  | Indeks Kepuasan Masyarakat . | Total dari nilai persepsi per indicator dibagi jumlah indikator yg terisi dikali nilai 100 | **86,20** |
|  |  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Hasil Survey Mandiri yang dilaksanakan oleh Kecamatan | **80** |
|  |  |  | Nilai Sakip Kecamatan. | Nilai Sakip OPD yang dinilai oleh Inspektorat | **85** |

## Program dan Kegiatan

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun pada tahun 2023 ada 5 Program, 10 Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Wungu secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Wungu | | | | | |  | | |  | |  |  | | | lembar…. | | dari…. |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | | **Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)** | | | | | | | **Catatan Penting** | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023** | |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** | | | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** |
| **1** | | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | **8** | | **9** | **10** |
| **7** | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **7.01** | | | | **Administrasi Pemerintahan**  **( Kecamatan )** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah  2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | | Kec. Wungu | 84,00 nilai  79 nilai | | 18.779.922  **4.459.612.685** | | | DAU |  | | 85,00 nilai  80 nilai | 18.779.922 **4.551.748.610** |
|  | 01 | 201 |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**  **Kinerja Perangkat Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 201 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Kec. Wungu | 16 Dokumen | | 0 | | | DAU |  | | 16 Dokumen | 13.000.000 |
|  | 01 | 202 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan  Tunjangan ASN | | Kec. Wungu | 12 Bulan | | 4.066.788.610 | | | DAU |  | | 12 Bulan | 4.066.788.610 |
|  | 01 | 205 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 205 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Kec. Wungu | 10 Dokumen | | 0 | | | DAU |  | | 10 Dokumen | 0 |
|  | 01 | 206 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  | |  |  | | 174.235.511 | | |  |  | |  | 84.953.114 |
|  | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | | 3.486.670 | | | DAU |  | | 1 Paket | 7.835.157 |
|  | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | | 19.563.521 | | | DAU |  | | 1 Paket | 16.535.550 |
|  | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang  Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | | 16.948.059 | | | DAU |  | | 1 Paket | 5.657.009 |
|  | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang  Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | | 0 | | | DAU |  | | 1 Paket | 0 |
|  | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan  yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | | 10.307.791 | | | DAU |  | | 1 Paket | 10.964.548 |
|  | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Dokumen | | 0 | | | DAU |  | | 1 Dokumen | 0 |
|  | 01 | 206 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Paket | |  | | | DAU |  | | 1 Paket | 0 |
|  | 01 | 206 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Kec. Wungu | 1 laporan | | 0 | | | DAU |  | | 1 laporan | 0 |
|  | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Kec. Wungu | 1 Laporan | | 123.929.470 | | | DAU |  | | 1 Laporan | 43.960.850 |
|  | 01 | 206 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Kec. Wungu | 1 Dokumen | | 0 | | | DAU |  | | 1 Dokumen | 0 |
|  | 01 | 207 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 207 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1. Unit | | 9.315.000 | | | DAU |  | | 1. Unit | 25.305.100 |
|  | 01 | 208 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  | |  |  | | 102.060.664 | | |  |  | |  | 113.966.146 |
|  | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Kec. Wungu | 12 Laporan | |  | | | DAU |  | | 12 Laporan |  |
|  | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Kec. Wungu | 12 Laporan | | 79.984.905 | | | DAU |  | | 12 Laporan | 93.092.000 |
|  | 01 | 207 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | Kec. Wungu | 3 Unit | | 9.315.000 | | | DAU |  | | 3 Unit | 0 |
|  | 01 | 207 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Kec. Wungu | 1 Unit | | 0 | | |  |  | | 1 Unit | 0 |
|  | 01 | 208 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Kec. Wungu | 12 Laporan | | 22.074.146 | | | DAU |  | | 12 Laporan | 20.874.146 |
|  | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Kec. Wungu | 12 Laporan | | 79.984.905 | | | DAU |  | | 12 Laporan | 93.092.000 |
|  | 01 | 209 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Kec. Wungu | 9 Kendaraan | | 80.323.259 | | | DAU |  | | 9 Kendaraan | 44.960.000 |
|  | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | Kec. Wungu | 7 Jenis | | 0 | | | DAU |  | | 7 Jenis | 15.000.000 |
|  | 01 | 209 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Kec. Wungu | 1 Gedung | | 0 | | | DAU |  | | 1 Gedung | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 02 |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 02 | 201 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 201 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Wungu | 1 Dokumen | 34.864.500 | DAU |  | 1 Dokumen | 34.864.500 |
| 7 | 01 | 02 | 202 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 202 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Wungu | 1 Laporan | 6.207.024 | DAU |  | 1 Laporan | 6.655.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 203 | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 203 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Kec. Wungu | 1 Paket | 0 | DAU |  | 1 Paket | 0 |
| 7 | 01 | 03 |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 03 | 201 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** |  |  |  | 86.906.088 |  |  |  | 58.953.000 |
|  | 03 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Wungu | 1. Lembaga | 51.743.048 | DID |  | 1. Lembaga | 46.341.000 |
|  | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Wungu | 1 Laporan | 35.163.040 | DID |  | 1 Laporan | 12.612.000 |
| 01 | 04 |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 201 |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Wungu | 1 Laporan | 0 | DID |  | 1 Laporan | 0 |
| 01 | 04 | 201 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Wungu | 1 Laporan | 0 | DID |  | 1 Laporan | 0 |
| 01 | 05 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **05** | **201** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** |  |  |  | 49.397.800 |  |  |  | 87.882.640 |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan kesatuan bangsa. | Kec. Wungu | 100 Orang | 10.630.400 | DID |  | 100 Orang | 38.189.000 |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec. Wungu | 100 Orang | 5.622.400 | DID |  | 100 Orang | 8.598.640 |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Kec. Wungu | 1 | 33.145.000 | DID |  | 1 | 41.095.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 06 |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 06 | 201 |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 06 | 201 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Wungu | 1 Dokumen | 41.378.729 | DID |  | 1 Dokumen | 49.285.000 |
| 01 | 06 | 201 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Wungu | 1 Dokumen | 0 | DID |  | 1 Dokumen | 0 |

# BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Wungu pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wungu dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Wungu berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Wungu berdasarkan pagu indikatif.

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun pada tahun 2023 merencanakan 5 ( lima ) program dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publikdengan kegiatan sebagai berikut :

1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Kegiatan sebagai berikut :

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

dengan Kegiatan :

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum, dengan sub kegiatan sbb :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan

kegiatan :

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Program | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut : |

6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub

Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sbb :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6.8. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*

*Pemerintahan Daerah.*

* + 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Wungu pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

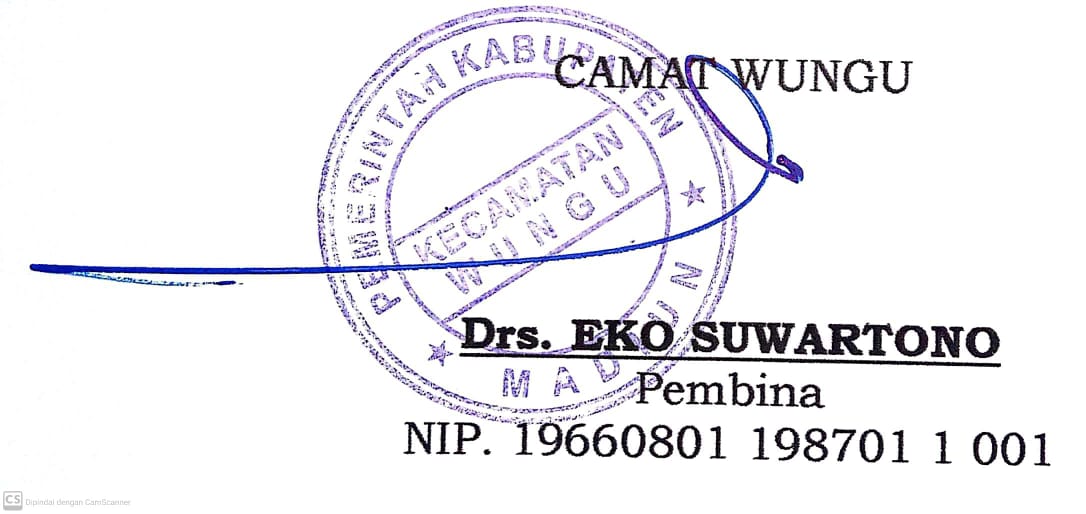
Tabel 4. 1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Triwulan I** | | **Triwulan II** | | **Triwulan III** | | **Triwulan IV** | | **Kinerja Renja 2023 (Tahun n)** | |
| **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Target Kinerja** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
|  | 01 |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah  2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah | 83  88 | 5.056.649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.056.649 |
|  | 01 | 201 |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**  **Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 201 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19 Dokumen | 24.150.000 | 16 dokumen | 0 | 16 dokumen | 10.500.000 | 16 dokumen | 0 | 16 dokumen | 34.650.000 |
|  | 01 | 202 |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dicukupi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan  Tunjangan ASN | 12 bulan | 4.066.788.610 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 0 | 12 bulan | 4.066.788.610 |
|  | 01 | 205 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 205 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10 dokumen | 0 | 10 dokumen | 0 | 10 dokumen | 0 | 10 dokumen | 0 | 10 dokumen | 0 |
|  | 01 | 206 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dicukupi |  | 125.397.298 |  | 73.408.330 |  | 27.570.379 |  | 0 |  | 226.376.007 |
|  | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 7.835.157 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 7.835.157 |
|  | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang Disediakan | 12 paket | 16.535.550 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 16.535.550 |
|  | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang  Disediakan | 12 paket | 5.657.009 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 5.657.009 |
|  | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan  yang Disediakan | 12 paket | 10.964.548 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 0 | 12 paket | 10.964.548 |
|  | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 laporan | 43.960.850 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 43.960.850 |
|  | 01 | 208 |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi |  | 274.660.793 |  | 89.900.000 |  | 66.298.950 |  | 0 |  | 430.859.743 |
|  | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 20.874.146 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 20.874.146 |
|  | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 93.092.000 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 0 | 12 laporan | 93.092.000 |
|  | 01 | 207 |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicukupi |  | 25.305.100 |  |  |  |  |  |  |  | 25.305.100 |
|  | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 25.305.100 | 1 unit | 0 | 1 unit | 0 | 1 unit | 0 | 1 unit | 25.305.100 |
|  | 01 | 209 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicukupi |  | 142.377.828 |  |  |  |  |  |  |  | 142.377.828 |
|  | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 kendaraan | 82.838.439 | 9 kendaraan | 42.369.969 | 9 kendaraan | 17.169.420 | 9 kendaraan | 0 | 9 kendaraan | 142.377.828 |
| 7 | 01 | 02 |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | 02 | 202 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 202 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 6.655.000 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 6.655.000 |
| 7 | 01 | 03 |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 03 | 201 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana |  | 46.341.000 |  | 4.850.000 |  | 7.762.000 |  | 0 |  | 58.953.000 |
|  | 03 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 lembaga | 46.341.000 | 1 lembaga | 0 | 1 lembaga | 0 | 1 lembaga | 0 | 1 lembaga | 46.341.000 |
|  | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 12.612.000 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 12.612.000 |
| 01 | 04 |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 201 |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 |
| 01 | 04 | 201 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 | 1 laporan | 0 |
| 01 | 05 |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **05** | **201** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yg terlaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 100 orang | 41.995.000 | 100 orang | 0 | 100 orang | 46.787.640 | 100 orang |  | 100 orang | 87.882.640 |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 60 orang | 8.598.640 | 60 orang | 0 | 60 orang | 0 | 60 orang | 0 | 60 orang | 8.598.640 |
| 01 | 05 | 201 | 04 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 dokumen | 41.095.000 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 41.095.000 |
| 01 | 06 |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 06 | 201 |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 06 | 201 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3 dokumen | 39.445.000 | 3 dokumen | 4.990.000 | 3 dokumen | 4.850.000 | 3 dokumen | 0 | 3 dokumen | 49.285.000 |

# BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tanun 2023.

Penyusunan Renja Kecamatan Wungu sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Wungu sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Menyebutkan Indikator di Kabupaten Madiun.

Madiun, 31 Januari 2023